

## DEMOKRASI BUKAN MILIK PEMIMPIN

**Andriyansah**  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Terbuka  
[andriyansah@ut.ac.id](mailto:andriyansah@ut.ac.id)

### ABSTRAK

*“Demokrasi” masih adakah demokrasi di negeri ini, rakyat sangat familiar dengan kata ini namun implementasi dalam berkehidupan dan berkenegaraan mungkin diketahui sebatas pemilihan Presiden atau kepala pemerintahan daerah. Demokrasi bukan hanya sebatas musyawarah untuk mufakat, bukan berarti bebas bertindak menurut pemahaman individu tetapi dibebaskan menurut undang-undang serta peraturan oleh Negara. Potret budaya demokrasi selalu membuat masyarakat mendengkur diri karena ketidakberdayaan. Tidak ada yang salah dengan cita-cita luhur bangsa ini untuk menuju Civil society. Demokrasi bukan hanya untuk kehidupan bernegara dan berbangsa tetapi harus menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat adil bukan hanya milik orang punya duit tapi adil juga milik rakyat kecil, berjalan tidaknya demokrasi bergantung pada pimpinan organisasi dari organisasi skala besar hingga organisasi berskala kecil. Pemimpinan yang arogansi tidak akan pernah mengimplementasikan demokrasi secara nyata. Arogansi berselimut demokrasi inilah yang akan melunturkan cita-cita luhur bangsa ini. Berkata mari bangkit sudah tidak tepat lagi diungkapkan tetapi mari melakukan, implementasi dari sila-sila dari Pancasila dalam memimpin dalam mewujudkan demokrasi hal ini harus dibuktikan demi cita-cita luhur bangsa sehingga bangsa ini, bukan negara yang selalu dipandang sebelah mata oleh dunia.*

**Kata Kunci:** *cita-cita luhur, pemimpin, civil society*

### PENDAHULUAN

Megawali tulisan ini, tidak salahnya jika *refresh* mengenai teori tentang demokrasi yang bermakna bahwa kekuasaan Untuk Rakyat.

Atau disebutkan sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat oleh karena itu setiap orang, siapa pun dia, memiliki satu suara yang sama nilainya. Ditinjau sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa *demis-cratein* atau *demos-cratos* mempunyai makna bahwa pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Menurut Henry B. Mayo Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemiliha-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjainnya kebebasan politik. Selain itu Maswadi Rauf 1997 menyatakan bahwa prinsip utama demokrasi adalah :

a. Kebebasan/Persamaan (*freedom/equality*)

Kebebasan dan persamaan adalah pondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasaan.

b. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

## **Demokrasi di Indonesia**

### 1. Demokrasi Desa

Mohammad Hatta pernah menyampaikan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut “demokrasi asli”.

Demokrasi desa memiliki lima unsur atau anasir, yaitu :

- a. rapat
- b. mufakat
- c. gotong-royong
- d. hak mengadakan proses bersama

e. hak menyingkirkan dari kekuasaan raja absolut

Demokrasi Indonesia modern menurut Mohammad Hatta harus meliputi tiga hal, yaitu :

- a. demokrasi di bidang politik
- b. demokrasi di bidang ekonomi
- c. demokrasi di bidang sosial

## 2. Demokrasi Pancasila

Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai :

- a. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik
- b. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi produser penyelesaian konflik yang terjadi.

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kedaulatan Rakyat
- b. Republik
- c. Negara Berdasarkan atas Hukum
- d. Permintaan yang Kontitusional
- e. Sistem Perwakilan

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut.

1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

## **PEMBAHASAN**

Di atas telah dijelaskan bahwa demokrasi menitik beratkan pada rakyat, sehingga rakyatlah yang mempunyai legitimasi kekuasaan. Prinsip utama demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk

mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Pada dasarnya Bangsa kita Indonesia jauh sebelum kemerdekaan sudah mempunyai cita-cita atau gambaran yang ingin dicapai oleh bangsa ini. Landasan itu tidak lepas dari cita-cita luhur bangsa.

### **Cita-Cita Luhur**

Sedari duduk di Sekolah Dasar kita sudah diakrabkan dengan “Cita-cita Luhur Bangsa”. Pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi di Indonesia merupakan karya monumental para tokoh pendiri negara (*founding fathers*) dengan visi masa depan dan berakar pada sejarah bangsa. Dengan Pancasila dan UUD 1945 Kita sebagai anak bangsa dan dunia luar bisa melihat wajah bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945, dinyatakan dengan jelas dan tegas tentang cita-cita luhur dibentuknya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Cita-cita luhur yang diamanatkan oleh UUD 1945 dituangkan dalam beberapa poin, antalain:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut sebenarnya adalah tugas paling pokok yang harus diwujudkan oleh Negara dalam hal ini adalah pemerintah yang sah.

Dapatkah kita melihat realisasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh UUD 1945 Dari Rezim Orde Lama hingga Orde Reformasi atau dapakaj kita melihat kegagalan merealisasikan cita-cita luhur banga Indonesia. *Pertama*, perlindungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan, maupun keamanan yang diberikan oleh negara masih belum merata kepada segenap bangsa Indonesia, melainkan hanya untuk individu/kelompok tertentu terutama yang dekat dengan pusat kekuasaan. Sedangkan, rakyat miskin yang bisa

kita lihat dari multidimensi untuk pangan, papan dan sandang seolah rakyat kecil dibutuhkan untuk keperluan pesta 5 (lima) tahun sekali dengan janji-janji para calon wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa pada saat kampanye yang berbunyi "memperjuangkan rakyat kecil", "membela kaum tertindas", dan masih banyak lainnya bagus dalam redaksional, tetapi dalam kenyataannya janji tinggal janji ibarat lagu lidah memang tak bertulang. Hukuman bisa dibeli begitu kutipan lagu karya Bona Paputungan yang berjudul "Andai Aku Jadi Gayus Tambunan" begitulah salah satu potret pelaksanaan demokrasi dinegara ini.

*Kedua*, dalam hal memajukan kesejahteraan umum atau mewujudkan negara yang sejahtera (*welfare state*), pemerintah juga masih belum mampu merealisasikannya dengan baik. Kesejahteraan hanyalah dimiliki dan dimonopoli oleh segelintir orang/kelompok masyarakat. Memang aneh rasanya jika kesejahteraan hanya tersebar dan berkuat pada orang/kelompok yang memang telah mapan. Kemapanan tersebut hanya diwariskan kepada orang/kelompoknya saja, bukannya dibagi atau disebar kepada orang/kelompok lain yang masih terjerat kemiskinan. Tidak sedikit data yang coba di paparkan oleh media masa masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat PHK atau tidak sedikit warga Indonesia yang tertindas bahkan harus menerima hukuman pancung diluar negeri sebagai TKI/TKW demi mencari kesejahteraan.

Membahas cita-cita luhur bangsa Indonesia, erat kaitannya dengan martabat bangsa adalah Martabat dan harga diri bangsa harus dijunjung dan dipertahankan oleh segenap bangsanya. Karena itu pula, kita wajib ikut mengangkat harkat, derajat, dan kedudukan yang terhormat bagi kemajuan bangsa. Sebab bangsa yang maju akan dihargai dan dihormati oleh bangsa lain Jadi jelas sesungguhnya cita-cita luhur bangsa Indonesia, bukan hanya berbicara untuk internal bangsa dari Sabang hingga Merauke tetapi untuk berkehidupan dengan Negara lain. Kaitannya untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa dikutip dari [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id) bahwa pemerintah dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Sedangkan prioritasnya berturut-turut sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
3. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

## **Pemimpin**

Pimpinan adalah merupakan suatu konsekuensi dari kedudukan atau status mereka, jadi merupakan suatu kekuasaan dari jabatan yang dipegangnya. Tanpa kedudukan semacam itu, para pemimpin (*leader*) masih dapat mencapai tujuan, apabila kekuasaannya itu betul-betul sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok yang dipimpinya. Ensiklopedia Administrasi (disusun oleh staf Dosen Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada) mengatakan bahwa Pemimpin (*Leader*) adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi tertentu, melalui proses komunikasi, yang diarahkan guna mencapai tujuan/tujuan-tujuan tertentu.

Kita dapat saja berbeda dari beberapa pandangan di atas dalam memaknai konsep pemimpin, namun yang dapat penulis simpulkan bahwa dari rumusan di atas secara umum, pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan/atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam bahasa Indonesia "pemimpin" sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar

yang sama "pimpin". Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda.

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan "pemimpin". Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan. (Kartini Kartono, 1994 : 181). Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi "LEADER", yang mempunyai tugas untuk me-LEAD anggota disekitarnya. Sedangkan makna LEAD adalah:

1. *Loyalty*, seorang pemimpin harus mampu membagnetkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
2. *Educate*, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan tacit knowledge pada rekan-rekannya.
3. *Advice*, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada
4. *Discipline*, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.

Dalam pandangan manajemen kepemimpinan disebutkan bahwa untuk mengenali karakteristik atau ciri pribadi dari para pemimpin, para psikolog mengadakan penelitian. Mereka berpandangan bahwa pemimpin ini dilahirkan bukan dibuat. Secara alamiah bahwa orang yang mempunyai sifat kepemimpinan adalah orang yang lebih agresif.

Lebih tegas, dan lebih pandai berbicara dengan orang lain serta lebih mampu dan cepat mengambil keputusan yang akurat. Pandangan ini mempunyai implikasi bahwa jika ciri kepemimpinan dapat dikenali. Maka organisasi akan jauh lebih canggih dalam memilih pemimpin. Hanya orang-orang yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan sajalah yang akan menjadi manajer, pejabat dan kedudukan lainnya yang tinggi. Ukuran dalam pencarian ciri kepemimpinan menggunakan dua pendekatan

1. Membandingkan bawahan dengan pemimpin
2. Membandingkan ciri pemimpin yang efektif dengan yang tidak efektif.

### **Fungsi-fungsi Kepemimpinan**

Perilaku pemimpin mempunyai dua aspek yaitu fungsi kepemimpinan (*style leadership*). Aspek yang pertama yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya. Agar berjalan efektif, seseorang harus melakukan dua fungsi utama yaitu :

- a. fungsi yang berkaitan dengan pemecahan masalah;
- b. fungsi-fungsi pemeliharaan (pemecahan masalah sosial).

Pada fungsi yang pertama meliputi pemberian saran pemecahan dan menawarkan informasi dan pendapat. Sedangkan pada fungsi pemeliharaan kelompok meliputi menyetujui atau memuji orang lain dalam kelompok atau membantu kelompok beroperasi lebih lancar.

### **Gaya Kepemimpinan**

Indonesia sepanjang sejarah memiliki 6 orang presiden mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun ada fakta lain yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki 8 orang presiden. Pada 19 Desember 1948, saat Belanda melakukan agresi militer II dengan menyerang dan menguasai ibu kota RI saat itu di Yogyakarta, mereka berhasil menangkap dan menahan Presiden Soekarno, Moh. Hatta, serta para

pemimpin Indonesia lainnya untuk kemudian diasingkan ke Pulau Bangka.

Kabar penangkapan terhadap Soekarno dan para pemimpin Indonesia itu terdengar oleh Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Sjafrudin mengusulkan agar dibentuk pemerintahan darurat untuk meneruskan pemerintah RI, atau lebih dikenal dengan PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia).

Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia. Negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain. Karena Soekarno dan Moh. Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka berarti terjadi kekosongan pimpinan pada Republik Indonesia. Assaat adalah Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Peran Assaat sangat penting. Kalau tidak ada RI saat itu, berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi. Namun, dengan mengakui keberadaan RI dalam RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini. Kita ketahui bahwa kemudian RIS melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Itu berarti, Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan untuk jabatan Presiden Indonesia Serikat sebagaimana dikutip dari <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=9397>. Untuk tidak meimbulkan pemahaman yang ganda kita sebut saja secara sah presiden Republik Indonesia, sudah mempunyai 6 (enam) presiden.

Setiap manusia pada dasarnya tidak mempunyai kesamaan dalam pola pikir. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain lingkungan dan ekonomi sehingga mempengaruhi gaya atau pola kepemimpinan. Gaya kepemimpinan meliputi:

- a. Gaya dengan orientasi tugas

b. Gaya berorientasi dengan karyawan. Pada gaya yang pertama pemimpin mengarahkan dan mengawasi melalui tugas-tugas yang diberikan kepada bawahannya secara tertutup, pada gaya ini lebih memperhatikan pelaksanaan pekerjaan daripada pengembangan dan pertumbuhan karyawan. Sedangkan gaya yang berorientasi pada karyawan lebih memperhatikan motivasi daripada mengawasi, disini karyawan diajak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan melalui tugas-tugas yang diberikan.

Ada beberapa teori yang dikutip guna keperluan penulisan makalah ini antara lain:

1. Teori X Dan Teori Y Dari McGregor Douglas McGrogor mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Konsep ini terkenal karena menggunakan asumsi-asumsi sifat dasar manusia. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai bergaya kepemimpinan otoriter dan sebaiknya seorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih cenderung menyukai gaya kepemimpinan demokratik.

2. Kisi-Kisi Manajerial Dari Blake Dan Mouton, dua gaya manajemen ini mendasari dua pendekatan pada manajemen yang efektif. Pada gambar dibawah menunjukkan jaringan ( kisi-kisi ) dimana pada sumbu horizontal adalah perhatian terhadap produksi-produksi sedang pada sumbu vertical adalah perhatian terhadap orang (Karyawan).

Penelitian Di Universitas Ohio State Dan Michigan Di universitas Ohio State, para peneliti mencoba mempelajari efektifitas dari perilaku kepemimpinan untuk menentukan mana yang paling efektif dari kedua Pendekatan Situasional "Contingency" Pendekatan ini menggambarkan tentang gaya kepemimpinan yang tergantung pada faktor situasi, karyawan, tugas, organisasi dan variabel lingkungan lainnya. Mary Parker Follett mengatakan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kepemimpinan yaitu:

- a. pemimpin,
- b. bawahan

c. situasi juga pemimpin harus berorientasi pada kelompok.

### ***Civil Society***

Kita masyarakat awam biasanya mengindetikan istilah awam bermakna sama dengan madani. Dikutip dari makalah yang berjudul “*Civil society di Indonesia*” oleh Nurul Azizah, 2009 bahwa Istilah masyarakat madani pertama kali dikemukakan oleh kelompok Nurcholis Majid (dan beberapa tokoh ICMC ) yang berarti masyarakat yang beradab, berakhlak mutlak dan berbudi pekerti luhur. Madani dimaknai oleh adanya kota mainah yang diungkap dengan istilah madaniyah, tamaddun, dan hadharah yang berarti peradaban. Menurut piagam madinah ada 10 prinsip pembangunan masyarakat madani (Ukidi, 1998) yaitu :

1. Kebebasan agama.
2. Persaudaran seagama dan keharusan untuk menanamkan sikap solidaritas yang tinggi terhadap sesama.
3. Persatuan politik dalam dalam meraih cita-cita bersama.
4. Saling membantu dan semua orang punya kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat
5. Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara.
6. Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara.
7. Penegakan hukum.
8. Memberlakukan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran.
9. Perdamaian.
10. Pengakuan hak atas setiap orang/individu.

Makna masyarakat madani (*civil society*) pada kelompok ini lebih menekankan pada suatu kondisi masyarakat yang sangat beradab dan bukan merupakan alat perjuangan untuk mengembangkan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, nuansa dari pemaknaan civil socity disini (yang diterjemahkan dengan masyarakat

madani) lebih mengutamakan komplemen bagi negara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun masyarakat madani di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

1. Kebhinekaan masyarakat, dimana kelompok-kelompok masyarakat ada yang saling hidup berdampingan, tolong menolong, saling menghargai, dan dapat hidup dengan damai.
2. Terselenggaranya kehidupan yang demokratis baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dimana hak-hak warga negara diakui dan dilindungi, baik oleh aparat maupun oleh masyarakat sendiri.
3. Bahwa untuk memelihara tata dalam masyarakat maka hukum sebagai pranata pengatur kehidupan masyarakat guna menyelenggarakan kepastian hukum dan keadilan perlu dijunjung tinggi baik oleh anggota masyarakat maupun oleh pemerintah.
4. Untuk mewujudkan suasana tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, maka hak-hak warga negara perlu diakui dan dilindungi baik oleh pemerintah maupun warga masyarakat.
5. Untuk mewujudkan masyarakat yang beretika dan bermoral tinggi, maka perlu adanya norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi baik oleh warga negara maupun aparat pemerintah sehingga tindakan-tindakan tercela tidak dilakukan. Namun apabila terjadi juga, maka hukum diberlakukan kepada pelakunya, siapapun orangnya.

### **Karakteristik *Civil Society***

Masyarakat madani Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri, yang bisa dilihat dari karakteristik berikut ini:

#### **1. Ruang Publik Yang Bebas**

Maksudnya adalah wilayah dimana masyarakat sebagai warga Negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara harus mempunyai kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Demokratisasi

Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Mekanisme demokrasi antar komponen bangsa, terutama pelaku politik praktis merupakan bagian yang terpenting menuju masyarakat madani. Keberadaan masyarakat madani hanya dapat ditunjang oleh negara yang demokratis.

## 3. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda.

## 4. Pluralisme

Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus yang bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segala segi.

## 5. Keadilan sosial

Dalam hal ini adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tiap-tiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

## ***Civil society dan Demokrasi***

*Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi, menurut Dawam Bagai kar dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko – eksistensi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana – suasana demokratislah Civil society dapat berkembang dengan wajar dikutip*

*dari Siti Halimah dalam “Membentuk Masyarakat Madani yang Demokratis, Harmonis, dan Partisipatif”*

Menyikapi keterkaitan masyarakat madani dengan demokratisasi ini, Larry Diamond secara sistematis menyebutkan ada 6 konstitusi masyarakat madani terhadap proses demokrasi.

1. Menyediakan wacana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat negara.
2. Pluralisme dalam masyarakat madani, bila di organisir akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokratis.
3. memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan.
4. ikut menjaga stabilitas negara.
5. tempat menggembelng pimpinan politik.
6. menghalangi dominasi rezim.

Secara esensial Indonesia memang membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat, secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal dan Negara sudah harus siap dengan program-program tersebut. Dalam hal ini menurut Dewan ada 3 (tiga) strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam meberdayakan masyarakat madani di Indonesia.

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran bangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan karena

pembangunan lebih – lebih yang terbuka terhadap perekonomian global membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.

2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun *demokrasi* tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama – sama diperlukan proses demokratis yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan , maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap negara.

3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.

Jika ditelisik lebih jauh permasalahan antara masyarakat madani dengan demokrasi bangsa ini terletak pada kepercayaan. Dikutip dari Djamaludin Ancok, 2007 “*Membangun Kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis dan Damai*”. Upaya membangun kepercayaan sebagai modal untuk membangun negara yang penuh kedamaian harus dilakukan semua institusi yang ada, yakni keluarga, pendidikan, masyarakat dan negara. Untuk melakukan ini semua diperlukan adanya visi bersama.

Visi adalah cita-cita bersama dalam membangun negara. Ingin melihat negara ini menjadi negara yang seperti apa, yang lebih baik dari kondisi sekarang ini. Visi ini harus disusun atas keinginan semua pihak bukan disusun dari atas untuk melayani kepentingan bersama. Visi yang merupakan milik bersama akan mudah untuk disosialisasikan. Tentu saja secara teknis tidaklah mudah untuk membangun visi bersama dengan melibatkan semua pihak. Namun dengan meminta masukan dan tanggapan atas visi yang disusun oleh sekelompok elit akan lebih memudahkan untuk membuat suatu visi dimiliki bersama. Upaya menyadarkan setiap insan bahwa

keanekaragaman adalah sumber kekuatan di dalam membawa negara pada kemajuan harus dilakukan bersama dengan usaha yang tidak henti-hentinya. Hanya dengan kebersamaanlah semua keinginan akan menjadi kenyataan. Bila visi diturunkan dari atas tanpa melibatkan kebersamaan akan menghantarkan visi tersebut pada kegagalan. Visi yang hanya diturunkan dari atas akan sangat sulit untuk mensosialisasikannya.

## **SIMPULAN**

Keeratan hubungan antara Pimpinan, demokrasi untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa menuju masyarakat madani akan lebih cepat tercapai jika para pimpinan tidak menafatkan kekuasaan mereka untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Demokrasi bukan semata untuk lipsing nyanyian tanpa suara untuk merebut hati rakyat, sehingga tidak pantas kalau demokrasi sering dikambing hitamkan untuk memfitnah, menyikuk atau apalah namanya untuk menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Pada prinsipnya demokrasi itu tidak bisa dijalankan hanya oleh pemimpin (*single fighter*) karena demokrasi bukan milik pimpinan tetapi milik rakyat dari rakyat untuk rakyat. Pemimpin yang baik harus bisa menerapkan dasar negara dalam setiap kebijakan ataupun keputusan.

*Civil society* atau masyarakat madani di Indonesia sudah sangat familiar sekali dengan faham demokrasi namun ketidak puasan akan keadilan yang disebabkan kemiskinan dari berbagai dimensi memicu rakyat untuk membentuk parlemen jalanan dan hakim jalanan apabila mereka terusik dari kenyamanan untuk pemilik modal. Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur cita-cita luhur bangsa ini tidak perlu lagi diperdebatan karena sudah terangkum dalam Pancasila dan UUD 1945. Semua unsur harus mempunyai niat dan etiket baik untuk kemajuan bangsa bukan semata hanya untuk kemakmuran dan kejayaan golongan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan masyarakat madani yang jangan pernah diragukan kecintaan rakyat akan republik ini tanpa peralatan modern pun penjajah bisa disuri dari bumi pertiwi ini. Mewujudkan cita-cita luhur bangsa bukan pula tugas semata pemimpin bangsa namun bukan pula rakyat

menjadi objek isu demokrasi untuk kepentingan partai, golongan atau kepentingan pribadi. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat, kalau lah cita-cita luhur ditegakkan untuk kedalam dan keluar bangsa demi rakyat bukan tidak mungkin bangsa Indonesia ini, bangsa yang paling disegani dan tidak ada yang menganggap sebelah mata terlebih menganggap bangsa ini, bangsa buruh.

Bukan saatnya lagi berkata mari kita bangkit tetapi kini saatnya kita tunjukkan kalau negara kita ini negara yang patut dicontoh menjadi kiblat peradaban dunia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alhaj, S.Z.S. Pargeran Dan Usmani Surya Patria, (1995), Pendidikan Pancasila. Jakarta.

Azizy, Qodri Abdillah (2000) Masyarakat Madani Antara Cinta dan Fakta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[http://coganinsan.multiply.com/journal/item/173/Realisasi\\_cita-cita\\_luhur\\_bangsa](http://coganinsan.multiply.com/journal/item/173/Realisasi_cita-cita_luhur_bangsa)<http://id.wikipedia.org./wikipedia>

<http://jariksumut.wordpress.com/2007/08/31/membentuk-masyarakat-madani-yang-demokratis-harmonis-dan-partisipatif/>

<http://thuafialghifari.multiply.com/reviews/item/105>

<http://www.scribd.com/doc/16075778/Demokrasi>

<http://www.scribd.com/doc/29047634/Martabat-Dan-Harga-Diri-Bangsa>

Kaelan. M.S., (2003) Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma. 2.

Soeprapto, H.Z.A. BAB III Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Jakarta: BP- Pusat.

Tim Penulis PPKn. 2004 Mhir PPKn SMU Kelas 3 Semester II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Kartono, Kartini. 1992. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suwondo, Kutut (2005). Civil society Di Aras Lokal. Salatiga : PT Pustaka Percik

Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Kompas Jakarta Februari 2001 hal 78

Winarto, (2007) Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Paradigma Baru. Jakarta : PT Bumi Aksara.  
[www.ancok.staff.ugm.ac.id/h-21/membangun-kepercayaan-menuju-indonesia-madani-demokratis-dan-damai.html](http://www.ancok.staff.ugm.ac.id/h-21/membangun-kepercayaan-menuju-indonesia-madani-demokratis-dan-damai.html)

[www.anakciremai.com](http://www.anakciremai.com)

[www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

Zainun Kamal dkk, (2005), *Islam Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina